



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ♦ informasi@pajak.go.id ♦
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-03377/CT/KPP.2504/2026
Tanggal	: 23 Januari 2026
NPWP	: 1111137112680027
Nama Wajib Pajak	: HUSNAWATI
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 23 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.



NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2508U7D99	01-2025-12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	1111137112680027		
A.2	Nama	:	HUSNAWATI		
A.3	Alamat	:	BIREUEN MNS TGK DIGADONG NO., BIREUEN MNS TGK DIGADONG		
A.4	NIP/NRP	:	196812311993032004	A.7	Status PTKP : K2
A.5	Jenis Kelamin	:	Wanita	A.8	Posisi : Kasubbag kepegawaian dan Ortala
A.6	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I / III.d	A.9	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2	Jenis Pemotongan	:	Setahun Penuh				

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	91.050.494
2.	Tunjangan Istri	0
3.	Tunjangan Anak	0
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	0
6.	Tunjangan Beras	0
7.	Tunjangan Lain-lain	0
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayaranannya Terpisah dari Pembayaran Gaji	0
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	91.050.494
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	4.552.525
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	5.370.795
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d 12)	9.923.320
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	81.127.174
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	81.127.174
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	13.627.000
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	681.350
20.	PPh Pasal 21 Terutang	681.350
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	681.350
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	1.198.099
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	-516.749

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP	:	0000987271104000
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	0000987271104000000000 - MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.3	Nama Pemotong	:	MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.4	Tanggal	:	21 Januari 2026
C.5	Nama Penandatanganan	:	SAFRINA
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.